

**THE ROLE OF SUB-DISTRICT HEAD IN PREVENTING SOCIAL CONFLICT
BASED ON LOCAL WISDOM IN PULAU HARUKU DISTRICT, CENTRAL
MALUKU REGENCY, MALUKU PROVINCE**

Alvin Putra Imanuel Manuhutu

NPP. 32.0991

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0991@prja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The main problem in this study is the occurrence of social conflict that is still vulnerable to occur in Pulau Haruku District. **Purpose:** This study aims to analyze the function of the role of the sub-district head in preventing social conflict in Pulau Haruku District. **Method:** The method used is descriptive quantitative with Rasch modeling, using a theory based on the theory of Achmad Santosa, Arimbi, and Horoeopetri regarding the role of sub-district heads. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, unstructured interviews, observation, and documentation. **Result/Findings:** Based on the results of data collection and analysis carried out by the researcher, it was found that the role of the sub-district head in preventing social conflict in Pulau Haruku District has been quite effective through an approach based on local wisdom values with formal government mechanisms. **Conclusion:** In conclusion, the role of the sub-district head in preventing social conflict needs to strengthen and develop a strategy for preventing social conflict by increasing the intensity of socialization and dialogue between countries. **Suggestion:** In addition, efforts to prevent social conflict through local wisdom values must continue to be improved and preserved.

Keywords: *Conflict Prevention, The Role of Sub-district Heads, Wisdom*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terjadinya konflik sosial yang masih rentan terjadi di Kecamatan Pulau Haruku. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dari peran camat dalam pencegahan konflik sosial di Kecamatan Pulau Haruku. **Metode:** yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan pemodelan Rasch, dengan menggunakan teori berdasarkan teori dari Achmad Santosa, Arimbi, dan Horoepoetri tentang peran camat. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisa yang dilakukan peneliti menemukan bahwa peran Camat dalam pencegahan konflik sosial di Kecamatan Pulau Haruku telah berjalan cukup efektif melalui pendekatan yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dengan mekanisme pemerintahan formal. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, peran camat dalam pencegahan konflik sosial perlu memperkuat dan mengembangkan strategi pencegahan konflik sosial dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan dialog antar negeri. **Saran:** Selain itu, upaya pencegahan konflik sosial melalui nilai-nilai kearifan lokal harus terus ditingkatkan dan dilestarikan.

Kata kunci: Konflik sosial, Kearifan lokal, Pencegahan, Peran camat, Pulau Haruku

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan adat istiadat. Provinsi Maluku, sebagai bagian dari Indonesia, juga mencerminkan keberagaman ini. Namun, keragaman tersebut seringkali memicu kerentanan sosial dan konflik, seperti yang terjadi di Kecamatan Pulau Haruku. Dalam dua tahun terakhir, tercatat 38 kasus konflik sosial, yang dipicu oleh sengketa lahan, adat, agama, dan isu sosial lainnya. Tradisi lokal seperti **Pela dan Gandong**, yang menekankan persaudaraan antar negeri, menjadi pendekatan penting dalam penyelesaian konflik di Maluku. Meski demikian, belum semua negeri terikat oleh tradisi ini, sehingga potensi konflik masih tinggi. Karakteristik masyarakat yang mudah terprovokasi juga memperparah situasi.

Pemerintah merespons dengan menerbitkan regulasi seperti **Perda Nomor 10 Tahun 2022** tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mendorong peran **pranata adat dan camat** dalam pencegahan konflik. Camat Pulau Haruku memainkan peran penting melalui sosialisasi, mediasi berbasis kearifan lokal, serta pelibatan tokoh adat dan agama. Konflik seperti antara Negeri Pelauw dan Negeri Kariu, serta antara Negeri Hitu Lama, Hitu Messing, dan Wakal menunjukkan pentingnya pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik. Lembaga adat seperti **Saniri Negeri**, meski mengalami penurunan efektivitas, tetap memiliki potensi besar dalam menjaga perdamaian.

Penelitian ini fokus pada **peran camat** dalam mencegah konflik sosial berbasis kearifan lokal melalui tradisi Pela Gandong, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada teori konflik. Hal ini menunjukkan pentingnya pelibatan pemerintah lokal dan adat dalam menciptakan ketentraman di masyarakat Maluku.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi peran camat dalam pencegahan konflik sosial di kecamatan pulau haruku kabupaten maluku tengah provinsi maluku. Dan menganalisis faktor penghambat bagi peran camat dalam pencegahan konflik sosial di kecamatan pulau haruku kabupaten maluku tengah provinsi maluku.

II. METODE

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan temuan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui survei atau kuesioner. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai fenomena utama yang menjadi fokus penelitian, dengan dukungan angka-angka yang merepresentasikan fakta yang dapat diamati. Peneliti mengandalkan analisis Rasch, sebagaimana dikembangkan oleh George Rasch (1960), yang meliputi tahapan pengumpulan data melalui kuesioner, pengujian hipotesis, penggunaan analisis Rasch untuk mengukur kemampuan individu dan tingkat kesulitan item, serta menentukan probabilitas keberhasilan respon berdasarkan perbedaan tersebut. Data diperoleh dari responden di lokasi penelitian serta dari instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Kepolisian. Melalui pendekatan ini, disajikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai peran Camat dalam pencegahan konflik sosial berbasis kearifan lokal di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sehingga, penelitian ini memadukan metode kuantitatif dan deskriptif serta menggunakan pendekatan analisis Rasch untuk menguraikan permasalahan yang diteliti.

2.2 Operasional Konsep

Operasional konsep dalam penelitian ini merupakan proses untuk mengubah konsep yang bersifat abstrak atau teoritis menjadi bentuk yang konkret dan terukur agar dapat digunakan dalam pengumpulan serta analisis data. Proses ini penting agar konsep yang digunakan dalam penelitian dapat dijelaskan secara jelas, konsisten, dan dapat diuji secara empiris. Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep mengenai peran camat dalam penanganan konflik sosial dirumuskan melalui dimensi strategi dengan indikator monitoring dan evaluasi penanganan konflik, sosialisasi kebijakan dan peraturan, serta penguatan forum. Konsep peran camat memiliki konseptualisasi konstruk ukur dari Peran Camat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003) sebanyak 8 indikator.

2.3 Sumber data dan Sumber

Sumber data merujuk pada subjek yang menyediakan informasi untuk pengumpulan dan pengolahan data. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek atau subjek penelitian tanpa perantara, melalui metode seperti wawancara, survei, observasi, eksperimen, atau studi kasus. Sementara itu, data sekunder berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen atau data yang telah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan berbeda, tetapi digunakan kembali oleh peneliti untuk mendukung analisis saat ini.

Menurut Sugiyono (2022), populasi adalah keseluruhan subjek dengan karakteristik tertentu yang dijadikan objek kajian dalam penelitian. Populasi mencakup seluruh masyarakat di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan jumlah penduduk sebanyak 26.551 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2023. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Karena keterbatasan sumber daya, tidak semua anggota populasi bisa diteliti, sehingga diambil sampel sebanyak 75 orang yang terdiri dari pegawai kecamatan, tokoh masyarakat, warga,

aparat keamanan, serta RT/RW. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah **probability sampling** dengan metode **simple random sampling**, yaitu pemilihan sampel secara acak tanpa mempertimbangkan lapisan atau strata dalam populasi, sehingga setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk terpilih..

2.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sarana penting yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu studi. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen ini biasanya dirancang berdasarkan uraian variabel penelitian yang berasal dari teori-teori yang hendak diuji. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner dengan skala Likert yang terdiri dari lima pilihan jawaban. Skala Likert dipilih karena kemudahan dalam penyusunan serta tingkat keandalannya yang tinggi. Dengan menggunakan skala ini, variabel yang diukur dapat dijabarkan menjadi indikator yang selanjutnya digunakan untuk menyusun butir-butir pertanyaan dalam instrumen penelitian.

Dalam kuesioner, pernyataan dibedakan menjadi pernyataan positif dan negatif. Untuk pernyataan positif, penilaian dilakukan dari nilai 1 (Sangat Kurang) hingga nilai 5 (Sangat Baik). Sebaliknya, untuk pernyataan negatif, penilaiannya dibalik, yaitu dari nilai 5 (Sangat Kurang) hingga nilai 1 (Sangat Baik). Perbedaan ini penting agar interpretasi terhadap hasil tetap akurat. Keabsahan (validitas) dan konsistensi (reliabilitas) instrumen sangat ditekankan agar data yang dikumpulkan dapat dipercaya, sehingga hasil penelitian juga menjadi valid dan reliabel.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi aspek penting dan strategis dalam penelitian karena inti dari penelitian itu sendiri adalah memperoleh data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan mampu mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, beberapa metode digunakan untuk memperoleh data yang relevan. Pertama, teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis, gambar, atau elektronik yang bersifat konkret. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data jumlah penduduk Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kedua, kuesioner, yakni metode penyebaran pertanyaan tertulis kepada responden sebagai sampel penelitian guna mendapatkan data langsung. Ketiga, wawancara tidak terstruktur, yang merupakan metode tanya jawab terbuka dan fleksibel tanpa pola pertanyaan tetap, dengan tujuan menggali lebih dalam informasi terkait variabel yang sedang diteliti. Terakhir, observasi yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung dengan menggunakan pancaindra.

Bentuk observasi yang digunakan meliputi observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam aktivitas informan; observasi tidak terstruktur yang berkembang sesuai kondisi lapangan dan observasi kelompok yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pengamat. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif untuk mengamati secara langsung kegiatan Pemerintah kecamatan dalam upaya pencegahan konflik sosial. Penelitian ini juga melibatkan masyarakat luas di Kecamatan Pulau Haruku dengan klasifikasi tertentu sebagaimana dijelaskan dalam bagian sampel. Analisis data dilakukan menggunakan Model Rasch Many-Facets dari Sumintono dan Widhiarso (2014), yang mempertimbangkan kemampuan responden, tingkat kesulitan item, dan ketajaman penilai. Model ini menggunakan persamaan skala pemeringkatan untuk instrumen seperti skala Likert guna menghitung probabilitas responden dalam menjawab benar berdasarkan kemampuannya dan tingkat kesulitan item yang diberikan.

2.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, proses analisis data dilakukan setelah seluruh data dari responden atau sumber lainnya berhasil dikumpulkan. Menurut Schneider & Wagemann (2010) tahapan dalam analisis ini meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, penyusunan tabel data menurut variabel dari semua responden, penyajian data untuk masing-masing variabel guna menjawab rumusan masalah, serta penghitungan statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis deskriptif digunakan pada tahap awal untuk menyajikan data secara ringkas. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pemodelan Rasch, yang dilaksanakan melalui perangkat lunak Winsteps, untuk menganalisis peran camat dalam upaya pencegahan konflik sosial. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu pertama, melakukan pengujian validitas dan reliabilitas konstruk dari setiap indikator yang dikenal sebagai uji *summary statistics*. Kedua, melakukan evaluasi kualitas instrumen menggunakan *Wright Map* dan *Item Measure*. Hasil analisis kuantitatif ini akan memberikan informasi mengenai item mana yang paling mudah atau paling sulit disetujui oleh responden, yang kemudian ditindaklanjuti dengan analisis kualitatif untuk menarik kesimpulan dan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

2.7 Uji Instrumen Data

Pengujian instrumen data untuk memastikan bahwa alat yang digunakan dalam penelitian layak dan sesuai, sehingga dapat ditentukan apakah instrumen tersebut dapat digunakan atau perlu dilakukan penggantian. Instrumen hanya dapat digunakan jika memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan reliabel, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu.

Uji validitas instrumen bertujuan untuk mengevaluasi apakah setiap pertanyaan dalam kuesioner relevan dan layak digunakan, ataukah perlu dihapus atau diganti. Instrumen dikatakan valid jika benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam konteks pencegahan konflik sosial, item dalam kuesioner dinyatakan valid jika nilai *r hitung* lebih besar dari *r tabel* pada tingkat signifikansi 5%. Sebaliknya, jika *r hitung* lebih kecil dari *r tabel*, maka item dianggap tidak valid. Tingkat validitas dihitung menggunakan koefisien korelasi *product moment* dengan metode angka kasar Guilford, dan dianalisis dengan teknik *Corrected Item Total* terhadap data rasio untuk menilai validitas setiap item.

Uji reliabilitas, di sisi lain, berfungsi untuk menilai sejauh mana alat ukur menghasilkan data yang konsisten. Instrumen dianggap reliabel jika hasil pengukuran tetap stabil dan dapat dipercaya. Sebuah variabel dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* melebihi angka 0,6. Mengacu pada pendapat Sumintono dan Widhiarso (2014), reliabilitas diklasifikasikan sebagai berikut: nilai di bawah 0,67 dianggap lemah, 0,67–0,80 cukup, 0,81–0,90 baik, 0,91–0,94 sangat baik, dan di atas 0,94 dikategorikan istimewa.

2.8 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, lokasi dan jadwal merupakan elemen penting yang menentukan keberlangsungan proses pengumpulan data. Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan, sedangkan jadwal mencakup waktu pelaksanaan yang meliputi tanggal, bulan, dan tahun kegiatan tersebut berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Maluku yang ditetapkan sebagai lokasi utama karena relevansi institusinya dengan fokus penelitian. Di lokasi ini, dilakukan untuk pengumpulan data, observasi, serta interaksi langsung dengan informan kunci, termasuk tokoh masyarakat yang dipilih untuk mendukung kelengkapan data. Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan mengikuti kalender akademik Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun akademik 2024/2025, yang telah ditetapkan sebagai acuan resmi waktu pelaksanaan penelitian. Informasi lebih rinci mengenai tahapan jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel yang disusun dalam bagian lampiran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Haruku

3.1.1 Keadaan Geografis

Pulau Haruku terletak di tengah Kepulauan Maluku, timur Pulau Ambon, dan merupakan bagian dari Kepulauan Lease dengan luas sekitar 150 km². Pulau ini memiliki topografi berbukit dan bergunung, iklim tropis basah, serta ekosistem yang kaya, termasuk hutan hujan, mangrove, dan terumbu karang. Secara geologis, Haruku adalah pulau vulkanik yang berada di zona tektonik aktif. Penduduknya umumnya tinggal di daerah pesisir dalam desa-desa tradisional dengan akses transportasi laut. Haruku juga memiliki nilai sejarah penting dalam jalur perdagangan rempah-rempah sejak abad ke-16.

3.1.2 Keadaan Demografis

Tahun 2021, Pulau Haruku memiliki sekitar 27.077 penduduk yang mayoritas merupakan suku Maluku asli, khususnya etnis Ambon-Lease. Penduduknya didominasi oleh pemeluk agama Islam (59,61%), terutama di desa-desa pesisir utara seperti Pelauw, Kailolo, Kabauw, dan Rohomoni. Sementara itu, Kristen Protestan dianut oleh 40,46% penduduk, terutama di Hulaliu dan Kariu di pesisir selatan. Hanya sebagian kecil yang menganut Katolik (0,02%) dan Hindu (0,01%).

3.1.3 Pemerintahan

Sistem pemerintahan Pulau Haruku mengikuti struktur administrasi nasional dengan sentuhan adat lokal. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tengah dan terdiri dari satu kecamatan yang dipimpin camat. Menurut Sangadji (2022), di tingkat desa, pemerintahan dipimpin oleh raja yang dipilih secara demokratis dengan mempertimbangkan garis keturunan. Pemerintahan desa juga melibatkan perangkat desa dan lembaga adat Saniri Negeri, yang berperan dalam keputusan adat, penyelesaian konflik, dan pelestarian budaya. Koordinasi antar tingkat pemerintahan dilakukan melalui forum pembangunan, dan pendanaan desa berasal dari dana pusat melalui APBDes. Tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dan SDM, namun integrasi nilai tradisional dan sistem modern menciptakan tata kelola yang sesuai dengan kondisi lokal.

3.1.4 Kondisi Sosial dan Budaya di Kecamatan Pulau Haruku

Kehidupan sosial masyarakat Pulau Haruku didasarkan pada sistem kekerabatan kuat, terutama melalui tradisi **pela gandong**, yang mempererat hubungan antar desa dan agama. Masyarakat menjunjung tinggi nilai gotong royong dan menghormati struktur sosial tradisional, seperti peran raja dan tetua adat. Kerukunan antar umat Islam dan Kristen Protestan terjaga dengan baik, tercermin dalam saling menghormati dan berpartisipasi dalam perayaan masing-masing. Secara budaya, tradisi seperti **Sasi Lompa** menunjukkan kearifan lokal dalam menjaga ekosistem. Seni tradisional, bahasa daerah, arsitektur rumah adat, dan kuliner khas tetap dilestarikan meskipun menghadapi tantangan modernisasi. Perayaan adat dan keagamaan menjadi bagian penting dalam memperkuat solidaritas komunitas. Masyarakat Haruku menunjukkan ketahanan budaya yang kuat dengan tetap menjaga identitas sambil beradaptasi dengan perubahan zaman.

3.1.5 Gambaran Umum Kearifan Lokal di Kecamatan Pulau Haruku

Camat Pulau Haruku memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan negeri. Bertanggung jawab kepada Bupati Maluku Tengah, camat mengoordinasikan urusan pemerintahan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Ia juga memfasilitasi komunikasi antar negeri, memastikan pelaksanaan kebijakan, dan memimpin Musrenbang Kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Selain itu, camat berperan menjaga ketertiban melalui koordinasi dengan pihak keamanan dan tokoh masyarakat dalam forum Muspika. Ia menjembatani sistem formal dengan lembaga adat seperti Saniri Negeri. Dalam pelayanan publik, kantor camat menjadi pusat administrasi masyarakat. Camat dituntut menjamin pelayanan yang berkualitas dan merata.

Tantangan utama camat mencakup keterbatasan infrastruktur, perlunya penerjemahan kebijakan formal ke dalam konteks budaya lokal, serta peran penting dalam penanggulangan bencana. Keberhasilan camat sangat ditentukan oleh kemampuannya memadukan tata kelola modern dengan kearifan lokal guna menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan pembangunan di Pulau Haruku.

3.1.6 Gambaran Umum Kearifan Lokal di Pulau Haruku

Kecamatan Pulau Haruku kaya akan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat dan diwariskan turun-temurun. Tradisi paling menonjol adalah Pela Gandong, yaitu ikatan persaudaraan antar negeri yang melampaui perbedaan agama dan sosial, terdiri atas Pela Darah, Pela Keras, dan Pela Tempat Sirih. Tradisi ini menjadi simbol toleransi dan kerukunan antarkelompok. Kearifan lokal lainnya adalah Sasi Lompa, ritual adat untuk menjaga kelestarian ikan lompa dengan larangan menangkap ikan pada waktu tertentu. Sasi dikoordinasikan oleh Kewang dan memperkuat solidaritas masyarakat melalui partisipasi bersama dalam penangkapan ikan saat panen.

Seni budaya seperti tari sawat, cakalele, dan musik tifa masih lestari, mencerminkan semangat dan nilai leluhur. Struktur sosial tetap menghormati raja dan tetua adat, sementara Saniri Negeri menjadi wadah musyawarah dalam pengambilan keputusan adat dan penyelesaian konflik. Kepemilikan tanah diatur secara adat melalui sistem tanah pusaka dan tanah dati. Upacara Panas Pela dan Angkat Pela berfungsi memperkuat atau membentuk ikatan baru antar negeri, sebagai mekanisme perdamaian dan solidaritas sosial. Meskipun dihadapkan pada modernisasi, masyarakat Pulau Haruku tetap melestarikan kearifan lokal melalui dukungan pemerintah, festival budaya, dokumentasi tradisi, dan pendidikan berbasis nilai-nilai adat.

3.2 Hasil dan Pembahasan

Bagian hasil dan pembahasan menyajikan analisis data yang diperoleh melalui kuesioner dan metode pengumpulan data lainnya selama penelitian yang dilakukan pada bulan Maret hingga April tahun 2025.

3.2.1 Uji Kuantitatif Peran Camat dalam Pencegahan Konflik Sosial

Uji kuantitatif terkait peran camat dalam pencegahan konflik sosial berbasis kearifan lokal di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku mencakup beberapa aspek, yaitu:

3.2.1.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data melalui nilai seperti mean dan standar deviasi. Berdasarkan hasil pada Tabel 1, dimensi Strategi memiliki nilai rata-rata tertinggi (13.00) dengan standar deviasi 2.793, menunjukkan penerapan strategi oleh camat dalam pencegahan konflik sosial cukup tinggi. Sementara itu, dimensi Alat Komunikasi memiliki rata-rata 8.67 dan standar deviasi 1.880, yang mengindikasikan penggunaan alat komunikasi yang relatif seragam.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Strategi	21	6	15	13.00	2.793
Alat Komunikasi	21	4	10	8.67	1.880
Valid N (listwise)	21				

Sumber: Data diolah 2025.

3.2.1.2 Uji Validitas

Uji validitas instrumen digunakan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner relevan dan mampu mengukur variabel yang diteliti. Sebuah item dinyatakan valid jika nilai r-hitung melebihi r-tabel (0,4329). Berdasarkan Tabel 2, seluruh indikator dinyatakan valid karena memiliki r-hitung lebih besar dari r-tabel. Indikator S1 memiliki r-hitung tertinggi (1,000), menunjukkan korelasi sangat kuat, sementara indikator lain seperti S1, S4, dan S5 juga menunjukkan validitas tinggi, menandakan konsistensi strategi dalam mengukur peran camat dalam pencegahan konflik sosial berbasis kearifan lokal.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Indikator	r _{tabel}	r _{hitung}	Keterangan
S1	0,4329	1,000	Valid
S2	0,4329	0,982	Valid
S3	0,4329	0,927	Valid
S4	0,4329	0,982	Valid
S5	0,4329	0,975	Valid
A1	0,4329	0,974	Valid
A2	0,4329	0,965	Valid
A3	0,4329	0,966	Valid

Sumber: Data diolah (2025).

3.2.1.3 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas mengukur konsistensi alat ukur, dengan standar reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,6. Menurut Sumintono dan Widhiarso (2014), reliabilitas dikategorikan sebagai lemah (<0,67), cukup (0,67-0,80), bagus (0,81-0,90), bagus sekali (0,91-0,94), dan istimewa (>0,94). Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 3, seluruh dimensi memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,6, menunjukkan instrumen penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi. Dimensi Strategi memiliki nilai tertinggi

(1,000) dan diikuti oleh Alat Komunikasi (0,962) yang semuanya berada dalam kategori reliabel.

Tabel 3
Hasil Uji Reabilitas

Dimensi	Cronbach's Alpha	Keterangan
Strategi	1,000	Reliabel
Alat Komunikasi	0,962	Reliabel

Sumber: Data diolah (2025)

3.2.2.1 Peran Camat dalam Pencegahan Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal

Camat Pulau Haruku berhasil menerapkan strategi pencegahan konflik sosial berbasis kearifan lokal dengan nilai mean tertinggi dalam uji statistik deskriptif (13.00). Berdasarkan teori peran camat, ia menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pengelola komunikasi, dan fasilitator konflik melalui forum komunikasi antar negeri, pertemuan adat, dan jejaring sosial dengan tokoh adat dan agama. Pendekatan ini terbukti efektif meredam konflik dengan menghidupkan nilai-nilai *Pela Gandong*.

Wawancara dengan camat menegaskan pentingnya komunikasi lintas budaya dan acara adat seperti *Panas Pela* sebagai alat penyatuan. Validitas dan reliabilitas instrumen (dengan Cronbach's Alpha > 0,9) menunjukkan bahwa strategi monitoring, sosialisasi kebijakan, dan penguatan forum warga dijalankan konsisten. Menurut Johannes (2017), dimensi alat komunikasi (mean 8.67) memperkuat efektivitas mediasi dengan dukungan lembaga seperti Saniri Negeri dan tokoh agama. Keberhasilan ini menunjukkan sinergi antara pendekatan budaya dan sistem pemerintahan formal sebagai kunci dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik di Pulau Haruku.

3.2.2.2 Strategi Sebagai Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Budaya Lokal

Strategi pencegahan konflik sosial di Kecamatan Pulau Haruku dijalankan melalui lima indikator utama yang menggambarkan peran aktif camat dalam menjaga stabilitas sosial. Pertama, **monitoring dan evaluasi (monev)** dilakukan camat secara berkala melalui pendekatan personal dan kelembagaan guna mendeteksi potensi konflik, meskipun evaluasi dinilai masih cenderung administratif. Hasil monev digunakan untuk memperbaiki strategi dan mengusulkan kebijakan ke tingkat kabupaten. Kedua, **sosialisasi kebijakan dan peraturan** dilakukan secara formal dan informal agar masyarakat memahami aturan dan menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, meski efektivitasnya dipengaruhi oleh literasi dan media komunikasi yang terbatas.

Ketiga, **penguatan forum komunikasi warga** menjadi sarana dialog lintas kelompok untuk membangun kepercayaan dan menyelesaikan isu lokal, dengan tantangan pada pendanaan dan keberlangsungan forum. Keempat, camat menghidupkan **tradisi *Pela Gandong*** sebagai pendekatan sosial-budaya untuk mempererat persaudaraan antar negeri, mendorong perdamaian, dan mencegah konflik berbasis SARA. Kelima, camat memberdayakan **tokoh adat, agama, dan masyarakat** sebagai mitra strategis dalam menjaga harmoni sosial dan sebagai penghubung antara kebijakan formal dan kearifan lokal. Sinergi ini menciptakan sistem peringatan dini sosial yang efektif, meski perlu diwaspadai dominasi atau rivalitas antar tokoh. Keseluruhan strategi ini menunjukkan bahwa camat berperan sebagai penggerak sosial, fasilitator budaya, dan mediator kebijakan dalam menjaga kohesi masyarakat Pulau Haruku.

3.2.2.3 Komunikasi dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial

Komunikasi dalam upaya pencegahan konflik sosial dijalankan dalam tiga indikator penting, yaitu **Indikator A1** menyoroti peran strategis camat dalam koordinasi lintas lembaga, baik formal seperti Polsek, KUA, dan Dinas Sosial, maupun informal seperti lembaga adat dan tokoh masyarakat. Koordinasi dilakukan melalui berbagai metode, seperti rapat, surat resmi, grup WhatsApp, dan pertemuan adat, dengan tujuan deteksi dini konflik, penanganan cepat, dan evaluasi bersama. **Indikator A2** menggarisbawahi pentingnya komunikasi antar kampung/negeri melalui forum rutin, penyuluhan, serta pemanfaatan media tradisional dan modern, untuk memperkuat jaringan informasi dan mendorong kerja sama antarwarga. Sementara itu, **Indikator A3** menekankan kemampuan camat dalam mediasi dan negosiasi, dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik secara damai dan membangun kepercayaan antarpihak. Menurut Gjerazi (2023), media and communication strategies for Conflict Prevention and Resolution. *Interdisciplinary Journal of Research and Development*, 10(2), 52-52. Ketiga indikator ini menunjukkan bahwa camat tidak hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi dan penjaga harmoni sosial di tingkat kecamatan.

3.2.2.4 Faktor Pendukung Pencegahan Konflik Sosial di Kecamatan Pulau Haruku

Berdasarkan hasil analisis, pencegahan konflik sosial di Kecamatan Pulau Haruku didukung oleh tiga faktor utama, yaitu pendekatan sosial budaya melalui tradisi lokal, komunikasi yang efektif, dan kekuatan tradisi Pela Gandong. Pendekatan sosial budaya ditunjukkan melalui pemanfaatan upacara adat seperti Panas Pela dan Angkat Pela, yang memperkuat solidaritas antar negeri. Pemberdayaan tokoh adat, agama, dan masyarakat juga memainkan peran penting karena mereka memiliki legitimasi sosial yang kuat, sehingga efektif dalam menyampaikan pesan perdamaian. Koordinasi camat dengan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, TNI, dan lembaga adat, menciptakan sistem deteksi dini yang responsif terhadap potensi konflik, sebagaimana tercermin dari nilai validitas tinggi pada indikator A1. Selain itu, komunikasi antar kampung/negeri yang difasilitasi melalui forum-forum dialog turut membangun pemahaman bersama dan mempererat kohesi sosial. Tradisi Pela Gandong sendiri menjadi kekuatan pemersatu yang melampaui perbedaan agama, karena mengajarkan prinsip persaudaraan, saling menghormati, dan membantu. Sinergi antara ketiga faktor ini berhasil dioptimalkan oleh camat dengan menggabungkan kearifan lokal dan pendekatan modern, menjadikan kearifan lokal sebagai sumber daya strategis dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.

3.2.2.5 Faktor Penghambat Pencegahan Konflik Sosial di Kecamatan Pulau Haruku

Selain berbagai faktor pendukung, pencegahan konflik sosial di Kecamatan Pulau Haruku juga menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakkonsistenan dalam pemanfaatan alat komunikasi yang tercermin dari tingginya variasi data, menunjukkan kurang optimalnya strategi modern dalam penanganan konflik. Negeri-negeri yang belum memiliki ikatan Pela juga berisiko tinggi terhadap konflik karena tidak adanya jalinan persaudaraan. Karakter masyarakat yang mudah terprovokasi, terutama di era media sosial, memperburuk situasi karena penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memicu konflik. Selain itu, perbedaan kekuatan struktur adat antar negeri menyulitkan penerapan pendekatan yang seragam. Minimnya pewarisan nilai-nilai Pela Gandong kepada generasi muda, serta jarangya pelaksanaan upacara adat, turut memperlemah peran budaya dalam mencegah konflik. Upaya pembentukan ikatan Pela baru juga sering ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar historis. Di sisi lain,

rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban dari perspektif budaya serta lemahnya peran Saniri Negeri dalam menyelesaikan konflik lokal membuat camat harus mengambil alih peran mediasi yang semestinya dilakukan di tingkat negeri.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Camat dalam pencegahan konflik sosial di Kecamatan Pulau Haruku cukup efektif, terutama melalui integrasi nilai-nilai kearifan lokal Pela Gandong dengan mekanisme pemerintahan formal. Strategi pencegahan konflik yang dilakukan camat, seperti penguatan forum komunikasi warga dan pelibatan tokoh adat serta agama, memperlihatkan pendekatan kolaboratif yang kontekstual. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Julia Masringor dan Besse Sugiswati (2017), yang menyatakan bahwa Pela Gandong efektif sebagai sarana penyelesaian konflik sosial karena mengandung nilai persaudaraan dan komitmen etis antar negeri di Maluku.

Temuan penelitian ini memperkuat pemahaman tersebut karena membuktikan bahwa tradisi Pela Gandong tidak hanya dapat digunakan saat konflik terjadi, tetapi juga sebagai alat pencegahan yang dipraktikkan oleh pemimpin pemerintahan formal seperti camat. Berbeda dengan temuan penelitian Rido Latuheru dan Hafied Cangara (2024) yang menekankan Pela Gandong sebagai strategi komunikasi krisis pasca konflik, penelitian ini menyoroti bahwa Pela Gandong dapat berfungsi preventif dalam mengantisipasi konflik sosial sebelum terjadi, menunjukkan perluasan fungsi tradisi lokal dari responsif menjadi preventif. Temuan ini juga memperkuat penelitian Muhammad Hasby dan Edi Wahyono (2020) yang menyebut Pela Gandong sebagai simbol perdamaian masyarakat. Namun, dalam konteks penelitian ini, penekanan lebih difokuskan pada peran aktif camat dalam merevitalisasi nilai-nilai perdamaian tersebut melalui kebijakan dan program budaya seperti Festival Pela Gandong dan dokumentasi sejarah Pela antar negeri.

Temuan ini menolak sebagian aspek penelitian Risqi Mumpuni Dyastuti (2024) yang hanya menitikberatkan Pela Gandong dalam aspek hubungan kekerabatan. Dalam penelitian ini, Pela Gandong dipahami tidak hanya sebagai simbol kekerabatan, melainkan sebagai instrumen strategis pemerintahan lokal dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Selain itu, perbedaan karakteristik objek penelitian juga menjelaskan adanya penolakan sebagian temuan penelitian Yakob Godlif Malatuny dan Samuel Patra Ritiauw (2018), yang menempatkan Pela Gandong sebagai bagian dari civic culture masyarakat Maluku secara umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pela Gandong sebagai alat pencegahan konflik lebih terasa pada wilayah-wilayah yang masih terikat dalam ikatan Pela aktif. Sementara itu, di wilayah tanpa ikatan Pela, seperti beberapa negeri di Pulau Haruku, implementasi nilai-nilai ini tidak selalu berjalan optimal, menandakan bahwa efektivitas civic culture sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana pemimpin formal seperti camat dapat memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial dengan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal. Penguatan lembaga adat, pemetaan keberadaan ikatan pela antar negeri, serta edukasi lintas generasi menjadi rekomendasi strategis agar tradisi Pela Gandong tetap relevan dan adaptif terhadap tantangan sosial kontemporer.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peran camat dalam pencegahan konflik sosial di Kecamatan Pulau Haruku dinilai cukup efektif dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Pela Gandong ke dalam mekanisme pemerintahan formal. Strategi menjadi aspek paling dominan dalam upaya pencegahan konflik, terutama melalui monitoring, evaluasi, sosialisasi kebijakan, dan penguatan forum komunikasi warga. Namun, peran camat menghadapi berbagai hambatan, seperti karakter masyarakat yang mudah terprovokasi, absennya ikatan Pela di beberapa negeri, kesenjangan pemahaman antargenerasi terhadap nilai Pela Gandong, serta kurang optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Negeri. Ketimpangan dalam penerapan pendekatan sosial budaya tercermin dari tingginya standar deviasi dalam pendekatan terapi. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban, camat bersama Badan Permusyawaratan Negeri melakukan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif, melibatkan tokoh adat, agama, dan masyarakat, serta merevitalisasi tradisi Pela Gandong melalui kegiatan budaya seperti Festival Pela Gandong dan dokumentasi sejarah Pela antar negeri. **Keterbatasan penelitian**, Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan secara mendalam karakteristik masyarakat yang mudah terprovokasi, tidak mencakup wilayah tanpa ikatan Pela, kurang mengeksplorasi kesenjangan pemahaman antargenerasi terhadap nilai Pela Gandong, serta belum mengkaji secara menyeluruh penyebab ketimpangan dalam penerapan pendekatan sosial budaya. **Arah masa depan penelitian**, Penelitian lanjutan yang lebih fokus pada analisis psikososial masyarakat dalam merespons konflik dan peran budaya lokal. Kajian yang memperdalam perbedaan efektivitas peran camat di negeri-negeri yang memiliki dan tidak memiliki ikatan Pela, untuk merumuskan strategi adaptif berbasis lokalitas. Penelitian tentang strategi pelestarian nilai Pela Gandong bagi generasi muda, termasuk pengaruh pendidikan formal dan informal. Studi evaluatif yang mengukur efektivitas program budaya dan forum komunikasi warga secara longitudinal, guna melihat dampak jangka panjang terhadap ketentraman sosial. Penelitian masa depan diharapkan lebih komprehensif dan aplikatif dalam mendukung upaya pencegahan konflik berbasis kearifan lokal.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S., & Horoepoetri, A. (2003). Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan. *Jakarta: Walhi*.
- Andrich, D. (2016). Georg Rasch and Benjamin Wright's struggle with the unidimensional polytomous model with sufficient statistics. *Educational and Psychological Measurement, 76*(5), 713-723.
- Gjerazi, B. (2023). Media and communication strategies for Conflict Prevention and Resolution. *Interdisciplinary Journal of Research and Development, 10*(2), 52-52.
- Hasby, M., & Wahyono, E. (2020). Kearifan Lokal Pela Gandong Sebagai Tanda Perdamaian Masyarakat. *Jurnal DMI, 1*: 76-86.
- Johannes, A. W. (2017). Transparansi Informasi Situs Web Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Proses Penerimaan Praja Ipdn. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 2*(2), 98-108.
- Madjid, U., & Pratama, A. (2021). Kinerja aparaturnya kecamatan tikala dalam mewujudkan manado kota yang bersih di kecamatan tikala kota manado provinsi sulawesi utara. *Jurnal Media Demokrasi, 3*(1), 1-25.
- Nawir, I. S. (2021). Penataan bangunan dan lingkungan di ipdn kampus sulawesi selatan. *Jurnal Pallangga Praja (JPP), 3*(2), 31-42.
- Sangadji, M., Lukman, E., Wasahua, J., Sofyan, Y., & Latuconsina, H. (2022). Population dynamics of Baelama anchovy *Thryssa baelama* (Forsskål, 1775) on the coast of Kabauw Village, Haruku Island, Central Maluku, Indonesia. *Aquaculture, Aquarium, Conservation*

- & *Legislation*, 15(4), 1872-1881.
- Schneider, C. Q., & Wagemann, C. (2010). Qualitative comparative analysis (QCA) and fuzzy-sets: Agenda for a research approach and a data analysis technique. *Comparative Sociology*, 9(3), 376-396.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumintono, B., & Widhiarso, W. (2014). Model Rasch untuk penelitian sosial kuantitatif. *Makalah Kuliah Umum Di Jurusan Statistika, ITS Surabaya, 21 November 2014, November, 201*, 1-9.
- Wangsanegara, L. T. A., (2021). Peran Camat Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Kecamatan Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Repository IPDN*, 1-18
- Masringor, J., & Sugiswati, B. (2017). *Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik*. Surabaya: Jurnal Perspektif.
- Latuheru, R., & Cangara, H. (2024). *Budaya Pela Gandong Sebagai Strategi Komunikasi Krisis Penyelesaian Konflik Ambon*. Ambon: Jurnal Badati.
- Hasby, M., & Wahyono, E. (2020). *Kearifan Lokal Pela Gandong Sebagai Tanda Perdamaian Masyarakat*. Indonesia: Jurnal DMI.
- Malatuny, Y. G., & Ritiau, S. P. (2018). *Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture Dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat Di Maluku*. Ambon: Sosio Didaktika.
- Dyastuti, & Mumpuni, R. (2024). *Identifikasi Pela Gandong Dalam Merilis Hubungan Kekerabatan*. Ambon: BAMEI Customary Law Review.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Azar, E. E. (1990). *The Management Of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*. New Hampshire: Dartmouth.
- Coombs, T. (2007). *Buku Pegangan Komunikasi Krisis*. Hoboken: Wiley Online Library
- Labolo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

